



► **PEMILU 2019**

Parpol Ingin Dapil Tak Diubah

JOGJA—Sejumlah partai politik (parpol) menilai daerah pemilihan (dapil) yang digunakan dalam Pemilu 2014 lalu paling cocok digunakan kembali dalam Pemilu 2019. Dapil itu dianggap paling realistis sehingga tidak perlu diubah.

*Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com*

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jogja, Rifki Listianto mengatakan partainya tidak mempersoalkan adanya wacana perubahan dapil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, penentuan dapil memang harus disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan.

Namun, dari hasil kajian terhadap tujuh prinsip penghitungan dapil, kata dia, tidak perlu ada perubahan dapil atau tetap seperti yang digunakan dalam Pemilu 2014. "Tapi penyesuaian jumlah kursi yang berubah dimana dapil empat dari tujuh kursi menjadi enam kursi dan dapil lima dari sembilan kursi menjadi 10 kursi," kata Rifki, Jumat (9/2).

- Penentuan dapil memang harus disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan.
- Penentuan kursi di tiap dapil dilakukan berdasarkan jumlah penduduk Kota Jogja dibagi jumlah kuota kursi DPRD Kota Jogja.

Diketahui, KPU Kota Jogja sudah menyiapkan tiga rancangan dapil untuk Pemilu 2019. Rancangan dapil tersebut akan diuji publik pada Sabtu (10/2) hari ini. Ketiga rancangan dapil tersebut, yakni lima dapil, sesuai dengan pola yang digunakan dalam Pemilu 2014 lalu dengan rincian dapil satu terdiri dari Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergangsan dengan jumlah kursi sembilan.

Kemudian dapil dua terdiri dari Kecamatan Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, dan Wirobrajan (tujuh kursi). Dapil tiga terdiri dari Kecamatan Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo (delapan kursi). Dapil empat terdiri dari Kecamatan Danurejan, dan Gondokusuman (enam kursi). Dan Dapil lima terdiri dari Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede (10 kursi).

● Lebih Lengkap Halaman 14

Instansi: _____
Tipe: _____
Ting: _____

Parpol Ingin...

Sementara rancangan kedua, yakni enam dapil dengan memisahkan Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede. Umbulharjo dalam rancangan masuk dalam dapil lima (tujuh kursi), dan Kotagede masuk dalam dapil enam (tiga kursi).

Adapun rancangan ketiga, yakni tetap mempertahankan lima dapil dengan perbedaan pada dapil empat yang tadinya memperoleh kuota enam kursi menjadi tujuh kursi karena ada tambahan Kecamatan Pakualaman. Opsi rancangan ketiga ini mengubah komposisi dapil dua yang tadinya tujuh kursi menjadi enam kursi.

Penentuan kursi di tiap dapil dilakukan berdasarkan jumlah penduduk Kota Jogja dibagi jumlah kuota kursi DPRD Kota Jogja. Penduduk Kota Jogja yang dihitung sebanyak 410.262 jiwa dibagi 40 kursi DPRD Kota Jogja. Hasil pembagian tersebut kemudian dibagi tiap kecamatan.

Senada dengan PAN, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Jogja juga berpedapat tidak perlu perubahan dapil. Ketua Badan Pemilu PKS Kota Jogja, Bambang Anjar Jalumurti mengatakan bahwa KPU Kota Jogja mengikuti aturan yang ada yaitu dalam proses pembobotan harus sesuai

variable yang sudah ditentukan, yaitu berdasarkan tujuh prinsip di antaranya kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu, proporsional, integritas wilayah, kohesitas dan kesinambungan. Sehingga hasilnya lebih objektif, bukan subjektif yang cenderung bernilai politis.

"Rancangan dapil yang memperoleh nilai tertinggi adalah dapil yang sudah digunakan saat Pemilu 2014, atau tidak ada perubahan dapil. Sehingga pemilu akan bisa memberikan hasil proses demokrasi yang berkualitas," kata Bambang, yang juga anggota DPRD Kota Jogja periode 2014-2019 dari dapil empat.

Anggota DPRD Kota Jogja dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Jogja, Hasan Widagdo tidak mempersoalkan jika ada perubahan sepanjang KPU mengedepankan prinsip akurasi data kependudukan dengan potensi pemilih, karena data kependudukan dan potensi pemilih adalah kunci. Namun ia lebih condong pada dapil seperti Pemilu 2014. "Rancangan satu sepertinya lebih afdol, mengingat ada beberapa kecamatan yang hanya terdiri dari dua kelurahan," ujar Hasan.

Sementara Gerindra dan

Partai Kebangkitan Bangsa tidak mempersoalkan adanya perubahan dapil. Kedua partai ini mengaku sudah menyiapkan kader-kadernya yang siap dicalonkan dari masing-masing dapil. Gerindra dan PKB mengaku sudah memiliki basis pendukung di hampir semua dapil. Namun, PKB lebih mendukung opsi rancangan kedua, yakni menjadi enam dapil dengan memisahkan Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede

"Opsi penambahan dapil lebih bagus, karena kalau dapilnya terlalu luas maka serapan aspirasinya juga kurang fokus dan tidak merata," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Jogja, Rochmad Mujari

Berbeda dengan partai lainnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru mempertanyakan usulan mereka yang tidak masuk dalam skema dapil yang akan diujipublikasikan, hari ini.

PDIP sempat mengajukan opsi lima dapil dengan komposisi dapil satu melingkupi Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergangsan. Dapil dua Kecamatan Ngampilan, Gondomanan, Pakualaman dan Danurejan (enam kursi). Dapil tiga Kecamatan Gedongtengen, Tegalrejo, dan Wirobrajan (delapan kursi).

Dapil empat Gondokusuman dan Jetis (tujuh kursi). Adapun dapil lima tetap seperti Pemilu 2014, yakni Umbulharjo dan Kotagede (10 kursi).

"Kami PDIP mempertanyakan kepada KPU kenapa rancangan usulan kami tidak masuk di KPU? Apakah ada unsur politis berkaitan dengan dapil," ucap Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto.

Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan tiga rancangan dapil yang disiapkan akan diujipublikasikan kepada partai, hari ini. Ia mengatakan rancangan dapil awalnya ada enam, namun dari hasil diskusi dan jajak pendapat dengan beberapa pihak dari masyarakat, LSM, dan partai mengerucut menjadi tiga.

Dari tiga rancangan pun, pihaknya sudah melakukan pembobotan melalui tujuh prinsip, di antaranya kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu, proporsional, integritas wilayah, kohesitas dan kesinambungan. Hasilnya, kata dia, dapil yang digunakan pada Pemilu 2014 mendapat penilaian tertinggi. "Hasil ini nanti akan kami sampaikan semuanya untuk mendapatkan masukan dan saran."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005